

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pedoman penulisan bagi peneliti yang hendak menyusun penelitian baru. Penelitian sebelumnya akan dijadikan rujukan oleh peneliti. Adapun penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi, Paulus K. Allo Layuk (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Siahaya, Meinarni Asnawi, Paulus K. Allo Layuk (2018) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan staf administrasi keuangan sebesar 49 SKPD dan sampel berjumlah 120, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan sampel berjumlah 43 responden.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- c. Perbedaan lokasi peneliti terdahulu adalah di Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan peneliti sekarang di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Erni Ermi, Gunawan Bata Ilyas, Hasmin Tasmin (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Ermi, Gunawan Bata Ilyas, Hasmin Tasmin (2018) berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah, kompetensi sumberdaya manusia dan sarana prasarana terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng. Sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada :

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi SDM.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Lokasi peneliti terdahulu yaitu pada Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, sedangkan peneliti sekarang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- c. Populasi peneliti terdahulu adalah semua pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 43 orang.

3. Putriasri Pujanira (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Putriasri Pujanira (2017) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama, berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada :

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan 15 dinas-dinas Daerah Pemerintah Daerah DIY dengan sampel berjumlah 120 responden, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan sampel berjumlah 43 responden.

4. Reno Julia Utama (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Reno Julia Utama (2017) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan daerah. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada :

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Populasi peneliti terdahulu adalah SKPD di Indragiri Hulu sampel dalam penelitian ini sebanyak 75, yang menjabat sebagai eselon keempat di satuan kerja daerah (SKPD) di Indragiri Hulu, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 43 orang.

5. Riedy Riandani (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Riedy Riandani (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Limapuluh Kota)”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti

empiris tentang pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada :

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan 30 SKPD yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan sampel berjumlah 49 responden, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dengan sampel berjumlah 43 responden pegawai yang terlibat yaitu PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan.

6. Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongan (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongan (2016) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, review laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan di Pemerintah Sulawesi Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, review laporan keuangan dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Persamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Persamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan antara antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan reviu laporan keuangan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Populasi penelitian terdahulu pada seluruh pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian

penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 43 orang.

7. M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016) berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penewrapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Persamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Persamaan variabel independen yang digunakan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia.

Terdapat perbedaan antara antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan peran audit internal sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 43 orang.

8. Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015) yang berjudul “Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan pemerintah daerah keuangan dan masalah / kendala yang dihadapi oleh SKPD di penyusunan laporan keuangan. laporan keuangan memiliki peran penting pada perumusan kebijakan pembangunan. Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat memberikan informasi akurat bagi para pembuat kebijakan. informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan ketidakakuratan perumusan kebijakan, yang membuat dampak negatif pada perkembangan institusi. Berdasarkan kualitas yang lebih rendah dari laporan keuangan pemerintah daerah, ini perlu diberikan perhatian khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan rekonsiliasi sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan 48 SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sampel berjumlah 141 responden, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan sampel 43 responden.

9. Firdaus, Nadirsyah, Heru Fahlevi (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Nadirsyah, Heru Fahlevi (201) berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan penerapan kebijakan akuntansi sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.

- b. Peneliti terdahulu menggunakan 38 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan tiap SKPD diwakili oleh 2 orang responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan sampel 43 responden.

10. As Syifa Nurillah (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014) berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diteliti adalah dampak kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Internal.

Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok, Jawa Barat, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 43 orang.

11. Desiana Anugrah Budiawan, Budi S. Purnomo (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Desiana Anugrah Budiawan, Budi S. Purnomo (2014) berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan koersif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

sementara kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah sistem pengendalian internal.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan kekuatan koersif sebagai variabel independen sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan variabel independen tersebut.
- b. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan responden kepala seksi akuntansi, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam PPK, sub bagian penyusunan anggaran dan sub bagian keuangan. Jumlah sampel yang diambil adalah 43 orang.

12. Yosefrinaldi (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang terdapat pada:

- a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan.
- b. Kesamaan variabel independen yang digunakan adalah kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal..

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan 19 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) se-Sumatera Barat. Setiap sampel masing-masing terdiri dari lima responden sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti sekarang

menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

- b. Peneliti terdahulu menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel intervening sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI DAN TAHUN	Variabel Independen				Variabel Dependen
		Kompetensi SDM	Sistem pengendalian internal	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	
1	Erwin Siahaya, Meinami Asnawi, Paulus K. Allo Layuk (2018)	B	B			Kualitas Laporan Keuangan
2	Erni, Gunawan, Hasmin (2018)	B				
3	Putriasri Pujanira (2017)	B			B	
4	Reno Julia Utama (2017)	B	B	B		
5	Riedy Riandani (2017)			TB		
6	Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, Jessy D. L. Warongan (2016)	TB	B	B		
7	M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih (2016)				TB	
8	Febrian Cahyo Pradono Basukianto (2015)	B	B	B		
9	Firdaus, Nadirsyah, Heru Fahlevi (2015)	TB		B		
10	As Syifa Nurillah, Dul Muid (2014)	B	B	B		
11	Desiana Anugrah Budiawan, Budi S. Purnomo (2014)		TB			
12	Yosefrinaldi (2013)	B	B	B		

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Keterangan:

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dijelaskan dan dikutip beberapa teori yang berhubungan dan mendasari penelitian ini.

2.2.1 *Decision-Usefulness Theory*

Teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertasi dengan judul *An Accounting Concept of Revenue* di *University of Chicago* Amerika Serikat oleh George J. Staubus. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors* (Staubus, 2000). Teori ini didasarkan pada permasalahan yang timbul berkenaan dengan konsep akuntansi yang berdasarkan biaya historis, bahwa konsep biaya historis tidak relevan dengan penilaian akuntansi dengan harga pasar atau pendekatan nilai sekarang terhadap harga wajar.

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan keputusan (*decision-usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), yaitu *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu a *theory of accounting to investors*. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman and Shoulder, 2008).

Teori kegunaan-keputusan informasi akuntansi harus mengandung komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan ekonomi. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan.

Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya. Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan

(*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, *decision-usefulness theory* memberikan signal kepada para manajemen dalam penerapan suatu standar akuntansi yang berhubungan dengan kepentingan pengungkapan informasi akuntansi kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan yang dikaitkan melalui komponen *decision-usefulness theory*.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2015 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang berlaku dalam rangka menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan bahwa laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini tentunya sangat berkaitan dengan *decision-usefulness theory*. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2.2.2 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*".

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan. Berdasarkan teori keagenan, terdapat dua macam hubungan keagenan, yakni hubungan keagenan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat. Mengacu pada teori agensi, akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, transparansi melalui laporan keuangan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat.

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan, (1995) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan

agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu penyusunan standar yang jelas mengenai jabatan fungsional dan struktural dengan diiringi sosialisasi dan implementasi. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka juga termasuk hal yang harus dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik.

Suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi disebut pengendalian internal. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan *reliable*. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 lampiran I menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Dengan adanya pengendalian intern yang efektif dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2.2.3 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali dikemukakan oleh Davis (1989) dan dikembangkan lagi oleh beberapa peneliti seperti Adam et. al. (1992), Szajna (1994), Igarria et. al. (1995), Venkatesh & Morris (2000), Venkatesh & Davis (2000), dan Sanjaya (2005). Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (*Theory of Reasoned Action*) yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah teknologi.

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, menjelaskan perilaku pengguna komputer yaitu berlandaskan pada kepercayaan (*belief*), sikap

(*attitude*), keinginan (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behaviour relationship*). Menurut Davis perilaku menggunakan TI diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan TI. Kedua komponen ini bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari *belief*. Persepsi mengenai manfaat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan TI. Disamping manfaat atau kegunaannya, penerapan sistem teknologi informasi akan dipengaruhi oleh kemudahan yang dirasa pengguna. Manfaat TI dan persepsi kemudahan penggunaan TI mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan TI. Selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-tugasnya, maka individu akan berniat untuk menggunakannya.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyajian laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan *technology acceptance model* yakni manfaat TI dan persepsi kemudahan penggunaan TI mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan TI. Selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-tugasnya, maka individu akan berniat untuk menggunakannya.

2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Bastian (2006:297) menjelaskan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP diatur mengenai unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yang terdiri atas Laporan Pelaksanaan Anggaran (terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Laporan Finansial (terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggung jawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang

maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Adapun laporan keuangan dapat dikatakan sudah berkualitas jika bisa memenuhi beberapa syarat karakteristik-karakteristik kualitas sesuai PP No.71 Tahun 2010, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan biasanya dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2.5.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen Laporan Keuangan pokok dalam Pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Jenis laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

2.2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2011:95). Sedangkan menurut (Moeheriono, 2012:5) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu

Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan. McClelland dalam Rivai (2011:299) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang, yang berpengaruh langsung, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013 pasal (1) tentang kompetensi, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. PP No 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi

kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Kapasitas harus di lihat sebagai kemampuan untuk kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi dalam dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Jika dikaitkan dengan logika berfikir, apabila sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif dan ekonomis, oleh karena itu kecenderungan sumber daya manusia mampu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.2.7 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian

Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal didefinisikan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud).

Pengendalian internal sendiri bertujuan untuk mengurangi tindak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Utama, 2017). Dalam lampiran 1 Permendagri No. 4 Tahun 2008, bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara SPI yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Menurut (Mulyadi, 2010:164) menyatakan bahwa terdapat tujuan pokok dari sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi

Apabila tidak dilindungi dengan pengendalian intern, kekayaan fisik perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak tanpa sengaja.

Demikian pula hanya dengan kekayaan nonfisik seperti aktivitas usaha, dokumen-dokumen penting dan catatan kegiatan perusahaan.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Agar dapat menyelenggarakan usahanya dengan baik, manajemen harus mempunyai informasi akurat yang berguna untuk pengambilan keputusan.

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kerja yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya yang tidak terkendali.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Manajemen membuat berbagai materi dan prosedur untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur pengendalian intern yang dimaksud untuk memastikan bahwa segala peraturan dan prosedur ditaati oleh personel perusahaan.

Jika dikaitkan dengan logika berfikir, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga harus diawasi melalui sistem pengendalian internal pemerintah, agar laporan yang dibuat bebas dari salah saji yang material sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapatkan opini yang diharapkan, yaitu wajar tanpa pengecualian.

2.2.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Rogers (1986) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai

sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain. Pendapat tersebut mengisyaratkan bagaimana teknologi informasi dapat memberikan andil dalam proses komunikasi individu secara efektif, khususnya dalam menembus ruang dan waktu ketika berkomunikasi dengan individu lainnya. Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh, seperti instrumental tools, atau dalam konteks teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan diantaranya komputer dan peranti pendukung lainnya. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*).

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan

kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Menurut Sutarman (2013:19) menyebutkan bahwa manfaat dari penerapan teknologi informasi yaitu:

1. Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.

3. Ketepatan (*Precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

Jika dikaitkan dengan logika berfikir, dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan ketepatanwaktuan laporan

keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.9 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual tuntas disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual.

Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sesuai dengan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan, basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui serta dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akrual, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.

2. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
3. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
4. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.
5. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
6. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya kea tau melakukan bisnis dengan entitas.
7. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

Jika dikaitkan dengan logika berfikir maka, laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui predikat opini wajar tanpa pengecualian ini sangat erat hubungannya dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya para pegawai di lingkup pemerintah daerah. Kompetensi SDM merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan maka sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi

tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini disebabkan karena nilai relevan dan reliabilitas membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan yang etis dan dapat menimbulkan konflik keagenan sesuai dengan *agency theory* sehingga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kinerja, kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi seberapa bagus kualitas laporan keuangan daerah. Semakin bagus kompetensi sumber daya manusianya semakin baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SDM yang memiliki kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pengendalian dalam aktivitas pemerintah akan men-dorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk meng-optimalkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Aspek yang paling penting dari

pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan (Yosefrinaldi, 2013).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM merupakan bagian penting yang dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Yosefrinaldi (2013) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Merlyn, dkk (2016) menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi SDM diukur oleh beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan, indikator yang mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan terdiri dari kompetensi merupakan indikator yang menggambarkan bahwa kompetensi SDM yang didasari dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman di bidang keuangan.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal

juga menentukan kualitas laporan yang baik. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah, karena kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui penerapan pengendalian internal tersebut. Jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan maka salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan *reliable*. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan *agency theory*.

Hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah perusahaan yang memiliki sistem pengendalian intern yang baik akan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari kesalahan salah saji. Semakin baik sistem pengendalian intern nya maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang di hasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan bagian penting yang dapat menghasilkan laporan keuangan daerah

yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Nurillah (2014) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Desiana (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal diukur oleh beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan, indikator yang mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan terdiri dari integritas data yang berkaitan dengan kode etik, perilaku, dan pembagian kewenangan. Ketepatan input dan posting data menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Prosedur otorisasi dokumen transaksi berkaitan dengan transaksi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dari pihak yang berwenang. Pembagian tanggung jawab berkaitan dengan adanya pemisahan tugas yang jelas.

2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Merlyn, dkk (2016) mendefinisikan bahwa teknologi informasi sangat luas dan mencakup semua bentuk teknologi yang digunakan dalam menangkap, manipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan dan menggunakan data yang akan diubah menjadi informasi. Kecenderungannya dalam upaya memperoleh efektivitas komunikasi jarak jauh, seperti instrumental tools, atau dalam konteks

teknologi informasi, maka teknologi yang digunakan diantaranya komputer dan peranti pendukung lainnya. Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai.

Teknologi informasi adalah seperangkat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Ketepatanwaktuan merupakan salah satu syarat atau indikator laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan *technology acceptance model* yakni manfaat TI dan persepsi kemudahan penggunaan TI mempengaruhi sikap individu terhadap penggunaan TI. Selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-tugasnya, maka individu akan berniat untuk menggunakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting yang dapat menghasilkan laporan keuangan daerah

yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Merlyn, dkk (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Riedy (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi diukur oleh beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan, indikator yang mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan terdiri dari komputer yang menggambarkan penggunaan *hardware*, *software*, *database*, jaringan internet yang menggambarkan pemanfaatan jaringan internet sesuai dengan yang dibutuhkan.

2.3.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. Akuntansi Berbasis Akrual berarti basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2015

mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan bagian penting yang dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Putriasri Pujanira (2017) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan M. Ali, dkk (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan diukur oleh beberapa indikator yang nantinya akan mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan, indikator yang mempengaruhi signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan terdiri dari PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan menggambarkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan, PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas menggambarkan Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, PSAP No. 03 Laporan Arus Kas menggambarkan Laporan arus kas

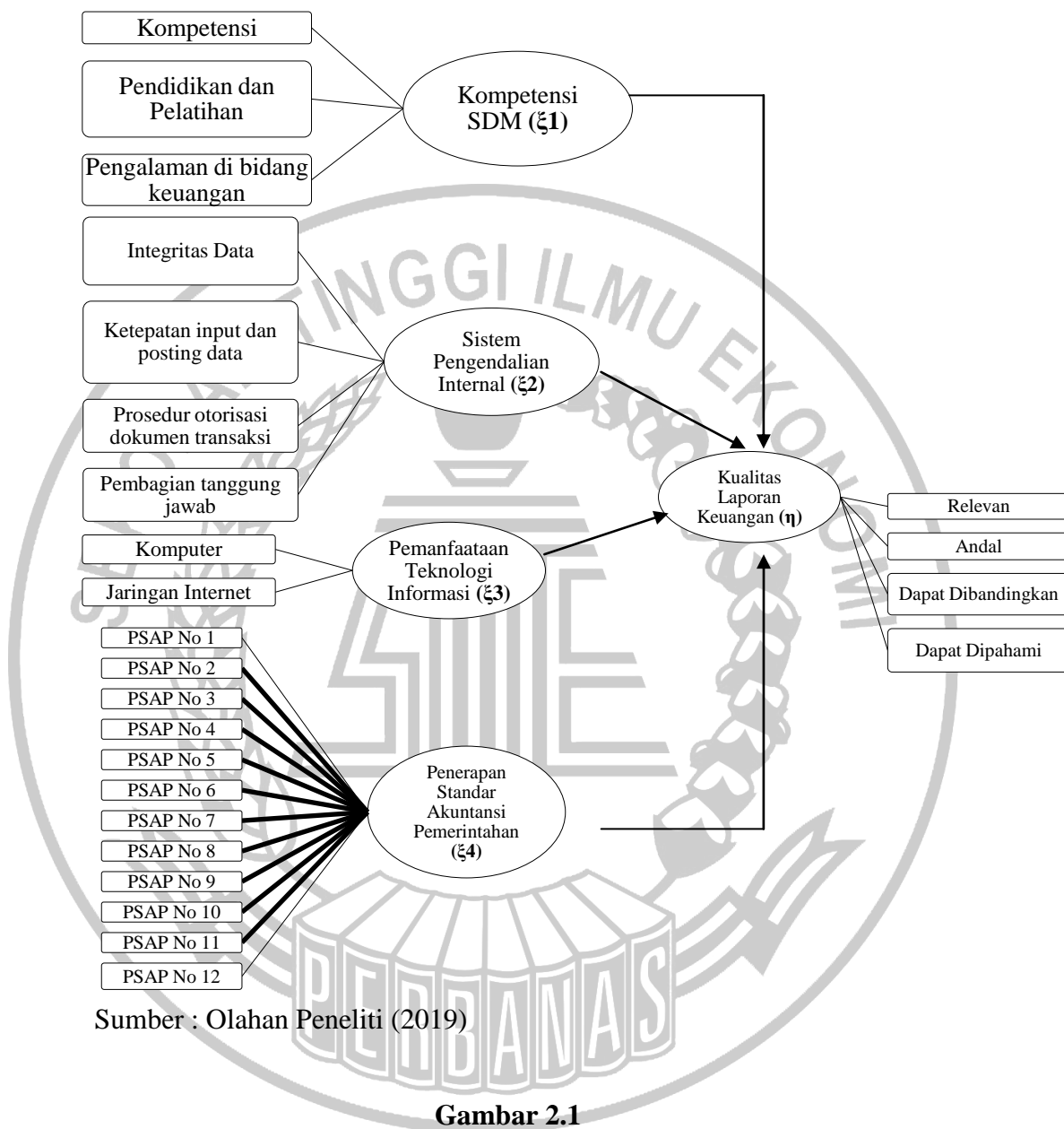
adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris, PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan menggambarkan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan menggambarkan persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, PSAP No. 06 Akuntansi Investasi menggambarkan suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai, PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap menggambarkan Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas, PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan menggambarkan konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta asset tetap lain yang proses pemerolehannya atau pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai, PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban menggambarkan suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian

yang dapat diukur dengan andal, PSAP No. 10 Koreksi kesalahan menggambarkan koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya, PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian menggambarkan Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP No. 12 Laporan Operasional menggambarkan laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam penelitian ini adalah :



Kerangka pemikiran

Dalam kerangka pemikiran diatas, terdapat empat variabel independen yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena *human capital* merupakan

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent* (As Syifa Nurillah, 2014). Sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka dapat menyelesaikan pekerjaan secara efisien, efektif dan ekonomis, oleh karena itu kecenderungan sumber daya manusia mampu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga harus diawasi melalui sistem pengendalian internal pemerintah, agar laporan yang dibuat bebas dari salah saji yang material sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mendapatkan opini yang diharapkan, yaitu wajar tanpa pengecualian.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan dapat meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah laporan keuangan akan berkualitas apabila sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, perumusan masalah, dan landasan teori diatas, maka hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H4 : Penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan